

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah telah memberikan kebebasan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya masing-masing sehingga pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian. Adanya pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan dampak positif yang mengharuskan daerah untuk menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di daerah dan atau mengoptimalkan potensi sumber daya dengan sektor unggulan yang ada di daerah tersebut. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah juga tentunya sangat mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Anwar Khairil et al., (2009), Pada tahap awal pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pembangunan daerah yang dimilikinya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Pertumbuhan ekonomi daerah dan prosesnya yang berkelanjutan itu adalah jaminan utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan ekonomipun ikut bertambah, sehingga di butuhkan pendapatan yang terus bertambah setiap tahunnya. Sektor unggulan wilayah menjadi salah satu tumpuhan tolak ukur untuk mengetahui berkembangnya suatu perekonomian daerah. Sektor unggulan menjadi salah satu tumpuhan bagi sektor lain sehingga menjadi pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto untuk skala nasional dan Produk

Domestik Regional Bruto untuk skala daerah. Konsep pendapatan produk domestik regional bruto adalah ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian yang berbeda dan secara rasional dapat di lihat bahwa jika nilai PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut semakin membaik, oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa setiap daerah memiliki percepatan pembangunan yang berbeda sesuai dengan kenaikan maupun penurunan nilai PDRB (Lubis Riduan dan Mariana Johana, 2013).

Perbedaan tingkat pembangunan yang didasarkan atas tingkat potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB di Indonesia pada saat ini ada 17 sektor, yaitu : pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri dan pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya.

Salah satu ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan disuatu daerah dalam lingkup provinsi dan kota adalah PDRB menurut lapangan usaha. Usaha menjaga keseragaman konsep, definisi dan cara atau metode yang dipergunakan dalam perhitungan di seluruh Indonesia, Badan Pusat Statistik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan

bimbingan teknis dan pengarahan yang sangat diperlukan. Karena secara teori PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari segi konsep, definisi, metodologi, cakupan dan datanya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di sebelah Tenggara Indonesia yang berbatasan dengan laut flores di sebelah utara, samudra hindia di sebelah selatan, timor leste di sebelah timur dan Propinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Provinsi ini memiliki 22 Kabupaten/Kota dan terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama dan 42 pulau di huni dan 1.150 pulau belum di huni.

Total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari andil tiap-tiap Kabupaten/Kota. Sumbangan PDRB tiap Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022 terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap Kabupaten/Kota tahun 2022 (Milyar Rupiah)

No	Nama-Nama 22 Kabupaten/Kota	Tahun 2022 (Milyar Rupiah)
1	Sumba Barat	1.499,06
2	Sumba timur	4.114,60
3	Kupang	5.022,10
4	Timor Tengah Selatan	5.035,10
5	Timor Tengan utara	3.031,63
6	Belu	3.116,23
7	Alor	2.106,33
8	Lembata	1.210,16
9	Flores Timur	3.582,89
10	Sikka	3.489,83
11	Ende	4.291,78
12	Ngada	2.407,71

13	Manggarai	3.097,18
14	Rote Ndao	2.045,28
15	Manggarai Barat	2.391,36
16	Sumbah Tengah	787,04
17	Sumba Barat Daya	2.444,60
18	Nagekeo	1.450,12
19	Manggarai Timur	2.165,25
20	Sabu Raijua	808,41
21	Malaka	1.987,25
22	Kota Kupang	17.138,22
Total		73.221,60

Sumber : BPS Provinsi NTT 2023

Berdasarkan tabel 1.1 Diatas dapat diketahui bahwa, dari jumlah total PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp.73.221,60 milyar dan total rata-rata sebesar 3.328,25 milyar. Kota Kupang memiliki andil terbesar dan diikuti oleh beberapa kabupaten yang lain seperti : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Tengah.

Sumbangsih PDRB tiap Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan tahun 2022 terhadap total PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka masih menempati posisi jajaran urutan akhir yaitu urutan ke 17 dari 22 dan memiliki nilai dibawah dari nilai total rata-rata dari setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berarti Kabupaten Malaka memiliki keterlambatan pertumbuhan, keterlambatan tersebut disebabkan antara

lain kurangnya pengelolaan potensi ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Malaka.

Kabupaten Malaka merupakan satu wilayah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia yang Ibu kotanya adalah Betun. Kabupaten Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Jumlah penduduk Kabupaten Malaka tahun 2019 berjumlah 194.300 jiwa.

Kondisi fisik serta topografi Kabupaten Malaka yang terdiri dari daerah pegunungan dan perbukitan, daratan serta wilayah pantai dan laut, menyimpan banyak potensi di beberapa sektor ekonomi, tetapi pengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Malaka masih tertinggal dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain kondisi fisik yang menjadi salah satu masalah pembangunan di Kabupaten Malaka, ada beberapa masalah lain yang berhubungan dengan potensi ekonomi itu sendiri. Kabupaten Malaka mempunyai sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan, namun sebelum diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Hal tersebut berguna untuk mengidentifikasi potensi ekonomi Kabupaten Malaka.

Masalah selanjutnya, dari pertumbuhan ekonomi yang ada belum diketahui sektor ekonomi apa yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan spesialisasi dalam lingkup Kabupaten. Hal tersebut penting, dikarenakan potensi yang belum diketahui dan sulit dikembangkan. Sehingga pertumbuhan yang ada

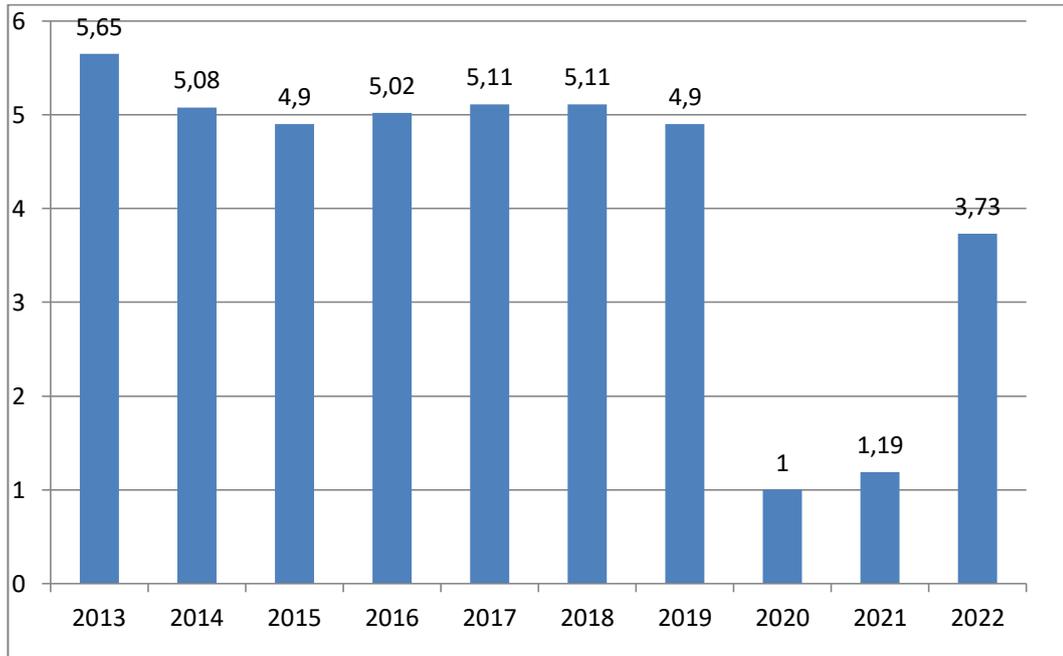
hanya tercermin pada angka-angka kuantitatif saja. Jika telah diketahui sektor apa saja yang memiliki potensi, maka pemerintah daerah dapat mengambil sikap dan kebijakan untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut dengan lebih tepat, sehingga dapat, meningkatkan pembangunan baik di Kabupaten Malaka.

Pemberdayaan potensi dan ciri khas daerah akan dapat berjalan jika sektor-sektor ekonomi khususnya yang berpotensi menjadi unggulan (leading sector) dapat dioptimalkan. Sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi unggulan ini penting untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Sektor yang menjadi unggulan ini adalah sektor yang memiliki potensi yang lebih untuk berkembang dibandingkan dengan sektor lainnya (Erika dan Mintari, 2013).

Berdasarkan PDRB Kabupaten Malaka, pertumbuhan PDRB di Kabupaten Malaka setiap tahun mengalami naik turun, hal ini mengakibatkan pertumbuhan yang cukup lambat dan belum mampu meningkatkan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Malaka. Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan PDRB Kabupaten Malaka secara lebih rinci pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1

Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kabupaten Malaka Tahun 2013-2022



Sumber data: BPS Kabupaten Malaka 2023

Berdasarkan grafik 2020 sebesar 1 persen. Pertumbuhan PDRB yang naik turun atau sering berubah-ubah setiap tahun hal ini terjadi karena kebijakan dari pemerintah yang kurangnya stabilitas dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Malaka.1.1 diatas menjelaskan tingkat pertumbuhan PDRB di Kabupaten Malaka tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 5,65 persen. Dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Malaka yang paling rendah pada tahun

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malaka disumbang oleh 17 sektor atau lapangan usaha perekonomian dengan perhitungan persen pada tahun 2022, Yang secara rinci dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Data Presentase Kontribusi PDRB 17 Sektor Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2022 di Kabupaten Malaka

No	Komponen PDRB	Presentase (%)
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	5,93
2	Pertambangan dan penggalian	2,28
3	Industri pengolahan	7,12
4	Pengadaan listrik dan gas	6,09
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	3,22
6	Kontruksi	-0,38
7	Perdagangan besar dan eceran, resparasi mobil dan sepeda motor	7,92
8	Transportasi dan pergudangan	7,27
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,19
10	Informasi dan komunikasi	5,63
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,00
12	<i>Real estate</i>	6,02
13	Jasa perusahaan	1,68
14	Atministrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,71
15	Jasa pendidikan	-0,15
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,17
17	Jasa lainnya	2,70
Jumlah PDRB		68,40

Sumber data: BPS Kabupaten Malaka 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa data PDRB 17 sektor tahun 2022 sumbangsi sektor tertinggi adalah 7,92 persen terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran, dan diikuti dengan sektor transportasi dan pergudangan , sektor industri pengolahan, sektor perdagangan listri dan gas, sektor real estate, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu jenis sektor lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi dibawah 5,00 persen.

Meskipun sektor perekonomian Kabupaten Malaka memberikan sumbangsi yang cukup besar untuk perekonomian Kabupaten Malaka namun pertumbuhan ekonomi yang relatif masih rendah dengan laju pertumbuhan yang

masi rendah pula akan membawa perekonomian Kabupaten Malaka semakin tertinggal. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Malaka dituntut untuk menggali dan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Malaka sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabupaten Malaka memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Selama ini banyak potensi di wilayah Kabupaten Malaka yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sehingga menjadi sulit bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas sektor unggulan wilayah dalam merencanakan pembangunan daerahnya. Apabila tidak dikembangkan dan dikelola maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka menurun. Meskipun Kabupaten Malaka memiliki sumber daya yang cukup besar, yaitu masih kesulitan untuk menetapkan kebijakan pembangunan terhadap sektor unggulan daerah. Seolah-olah pemerintah daerah mengalami hambatan untuk memiliki sektor yang mana yang harus dibangun terlebih dahulu.

Seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayahnya. Hal ini terkait dengan kewajibannya disuatu sisi menentukan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan disisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Sektor yang memiliki keunggulan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (Tarigan 2007).

Potensi ekonomi pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu atau segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik yang tergolong dalam sumber daya alam (natural resources/endowment factors) maupun potensi sumber daya manusia yang dapat diberikan manfaat (benefit) serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah. Potensi ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala kemampuan atau komoditi ekonomi yang ada pada suatu daerah yang dapat dikembangkan karena mempunyai keunggulan kompetitif menurut Nuranin (2010).

Berdasarkan Model Basis Ekspor oleh Douglas C. Nort dalam Sjafrizal (2012), pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya ditentukan oleh besar Keuntungan Kompetitif (Competitive Advantage) yang dimiliki oleh wilayah tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan ekspor tersebut akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang cukup besar bagi perekonomian daerah bersangkutan.

Dari data yang didapatkan belum menjelaskan secara tepat dan rinci sektor yang merupakan keunggulan dari kabupaten Malaka diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sektor unggulan yang ada di Kabupaten Malaka untuk menjadi salah satu dasar tolak ukur meningkatkan pembangunan daerah dalam pengembangan wilayah berdasarkan sektor unggulan yang didapatkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Strategi pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan di Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Malaka memiliki beberapa sektor yang dapat diandalkan tetapi tidak mengetahui secara pasti sektor yang dapat di prioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor unggulan wilayah sehingga dapat di prioritaskan dalam pengembangan wilayah, akan tetapi belum mengetahui prioritas terbesar yang dapat di kembangkan dan sektor unggulan yang ada. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisa terkait dengan penentuan sektor unggulan yang dapat membantu mengembangkan perekonomian wilayah Kabupaten Malaka, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi sektor-sektor basis dan non basis?
2. Apa saja sektor-sektor yang berpotensi mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah?
3. Apa saja sektor-sektor potensi sebagai laju pertumbuhan dan sektor unggulan wilayah?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor unggulan wilayah di Kabupaten Malaka, dalam pencapaian tulisan penulisan ini juga ada beberapa sasaran yang harus di capai antara lain:

1. Mengidentifikasi sektor yang menjadi sebagai potensi sektor basis dan non-basis dalam perekonomian Kabupaten Malaka.
2. Mengidentifikasi sektor yang menjadi potensi sebagai tingkat pertumbuhan dalam perekonomian Kabupaten Malaka.

3. Mengidentifikasi sektor-sektor apakah yang menjadi potensi sebagai laju pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Peneliti

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai penambah wawasan penulis tentang strategi pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan yang benar dan memperkuat teori pembangunan sebagai salah satu teori yang terkait dengan strategi pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan di Kabupaten Malaka.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah terkait bagaimana pentingnya menjaga stabilitas strategi pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan di Kabupaten Malaka dan diharapkan dapat mengatasi masalah sektor di Kabupaten Malaka.